



JURNAL BASICEDU

Volume 5 Nomor 6 Tahun 2021 Halaman 6307 - 6317

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa

Revita Yanuarsari^{1✉}, Iwan Asmadi², Hendi Suhendraya Muchtar³, Rita Sulastini⁴

Universitas Islam Nusantara, Indonesia^{1,3,4}

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia²

E-mail: revita@uninus.ac.id¹, iwan.iad@bsi.ac.id², hendipnf@gmail.com³, ritasulastini60@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, pendidikan dewasa ini harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada termasuk diantaranya perubahan kebiasaan karena keadaan dunia yang sedang mengalami pandemi covid 19. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang bertujuan untuk merespon perubahan tersebut dengan salah satu program yang terdapat di program MBKM yaitu proyek di desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan kajian literatur atau riset kepustakaan. Hasil penelitian mengatakan bahwa proyek di desa menjadi salah satu sarana penguatan karakter mahasiswa. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa ditantang untuk keluar dari zona nyamannya dan berlatih menghadirkan solusi dari problem yang ditemuinya di desa. Diharapkan dengan adanya program MBKM ini juga dapat membantu mewujudkan desa-desa mandiri di Indonesia.

Kata Kunci: MBKM, Desa Mandiri, Mahasiswa

Abstract

This research is motivated by changes in science and technology that are developing rapidly and bringing many changes in various aspects of life, education today must be able to adapt to existing changes including changes in habits due to the state of the world that is experiencing the covid 19 pandemic. Merdeka Campus is one of the policies of the Minister of Education and Culture Nadiem Anwar Makarim which aims to respond to these changes with one of the programs contained in the MBKM program, namely the village project. This study uses qualitative research methods based on literature review or library research. The results of the study said that the project in the village became a means of strengthening the character of students. As future leaders, students are challenged to get out of their comfort zone and practice presenting solutions to problems they encounter in the village. It is hoped that this MBKM program can also help realize independent villages in Indonesia.

Keywords: MBKM, Independent Village, Students

Copyright (c) 2021 Revita Yanuarsari, Iwan Asmadi, Hendi Suhendraya Muchtar, Rita Sulastini

✉ Corresponding author :

Email : revita@uninus.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 5 No 6 Tahun 2021

p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tentunya menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini banyak lapangan pekerjaan yang hilang dan digantikan dengan jenis pekerjaan baru yang banyak berkaitan dengan penggunaan teknologi. Sejarah revolusi industri di Inggris pada awal abad 18 telah merubah paradigma dunia dan menyadarkan dunia bahwa lambat laun tenaga manusia itu bisa tergantikan oleh mesin. Oleh karenanya dunia perlu mencetak sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif dan unggul sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal itu bisa dilakukan salah satunya melalui sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan investasi di masa yang akan datang yang memberikan banyak manfaat dan perubahan baik kepada diri sendiri, orang lain maupun bagi bangsa dan negara.

Menurut (Rasyid, 2015) untuk melahirkan manusia Indonesia yang unggul itu, diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pendidikan sebagai investasi masa depan. Hal ini sejalan dengan Suryadi dalam (Satiti, 2019) sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Manajemen pendidikan modern mengatakan salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Cheng dalam (Kasful, Anwar, 2013).

Mengingat perubahan ekonomi, sosial dan budaya terus melaju cepat, maka perguruan tinggi harus cepat tanggap dalam merespon hal tersebut dan melakukan transformasi pembelajaran untuk membekali dan mempersiapkan lulusan yang unggul, kompeten, berbudaya serta mampu menghadapi tantangan zaman. Hal ini sejalan dengan pendapat (Siregar et al., 2020) yang mengatakan melihat dari keadaan pada masa sekarang, dimana zaman telah semakin berubah dengan arus globalisasi, dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat. pendidikan tak boleh ketinggalan zaman pendidikan harus berjalan beriringan dengan setiap fase kehidupan yang terus berubah, yakni salah satunya adalah sistem pendidikan yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Menurut Bukhori dalam Dwiningrum (2021) sistem pendidikan yang sehat selayaknya dapat memahami zamannya dan berusaha memenuhi tuntutan yang ada pada zaman tersebut juga termasuk perubahan zaman yang akan datang. Artinya pendidikan dewasa ini harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada termasuk diantaranya perubahan kebiasaan karena keadaan dunia yang sedang mengalami pandemi covid 19.

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk merespon transformasi pembelajaran tersebut. Merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi, Nadiem mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun rencana strategis dalam mempersiapkan kompetensi mahasiswa secara matang untuk lebih siap menghadapi tantangan zaman. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) menurut (Rodiyah, 2021) menjadi salah satu terobosan dalam memacu sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, karena melalui program yang dicanangkan tersebut, diharapkan baik mahasiswa ataupun dosen memiliki pengalaman yang berbeda yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan, jaringan, dan keunggulan karakter. Ada dua konsep yang esensial dalam “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”. Pertama, konsep merdeka belajar mengandung arti adanya kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dulu oleh para pendidik. Pandangan seperti ini harus dilihat sebagai suatu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga pendidikan baik di sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Kedua, kampus merdeka merupakan bagian dari kebijakan merdeka belajar yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Merdeka belajar menawarkan program-program yang bisa dilakukan mahasiswa diluar kampus asal, program tersebut adalah magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar disekolah, pertukaran pelajar, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan proyek kemanusiaan.

Salah satu program dari kampus merdeka adalah proyek di desa. Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan desa tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yaitu “desa membangun dan membangun desa” yang keduanya diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Undang-Undang Desa membuka otonomi desa dalam proses desentralisasi pembangunan yang dipusatkan pada pemerintah desa. Mewujudkan desa mandiri menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan nasional. Pasalnya desa yang menjadi bagian penting dari pembangunan nasional seringkali dinilai tidak mampu berkembang dan masih bergantung kepada negara. Pembangunan desa tidak dapat berjalan optimal karena beberapa hal antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia, belum terbentuk kelembagaan desa yang kompeten, kurangnya partisipasi masyarakat desa, dan ketiadaan sistem regulasi desa yang dapat mendorong kemandirian desa. Pembangunan desa yang tidak optimal semestinya segera ditangani dengan segera, mengingat desa menyimpan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kemandirian desa.

Pemerintah melalui program Nawacita poin ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan mulai memperhatikan pembangunan nasional yang dimulai dari desa. Dana desa yang merupakan realisasi dari Program Nawacita menjadi kesempatan emas bagi seluruh desa di Indonesia untuk memulai pembangunan desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dan mewujudkan desa mandiri. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri

serta membangun keterkaitan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Keberadaan kampus, menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan desa tersebut untuk mewujudkan desa-desa mandiri di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan bahwa mengerjakan proyek di desa menjadi salah satu sarana penguatan karakter mahasiswa. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa ditantang untuk keluar dari zona nyamannya dan berlatih menghadirkan solusi dari problem yang ditemuinya di desa. Ia menekankan pentingnya pembelajaran yang diperoleh mahasiswa selama mengerjakan proyek di desa. Mahasiswa harus berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi (prodi) lain, dengan warga, dan pengurus desa. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengakrabi keberagaman yang ditemuinya di lapangan. Hal itu menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk penguatan karakter. Melalui pengabdian di desa, pemanfaatan dana desa dapat lebih optimal dan tepat guna. Ia menjelaskan, proyek yang menggunakan dana desa nantinya akan didukung tenaga-tenaga muda yang memiliki intelektualitas dan siap menjadi rekan bagi para pengelola desa. Diawali dengan program pengabdian mahasiswa di suatu desa, maka universitas asal mahasiswa tersebut pada akhirnya akan merancang program-program lanjutan bagi desa tersebut hingga desa yang dibina menjadi mandiri.

METODE

Penelitian Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui literatur-literatur berupa jurnal, buku, serta artikel ilmiah sebagai objek utama. Studi pustaka menurut Zeid dalam (Supriyadi, 2017) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Metode kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dan dapat dipercaya validitas dan reabilitasnya. Validitas data menggunakan triangulasi data.

Data penelitian diperoleh dengan cara mencari sumber referensi dari buku-buku maupun e-book, kemudian jurnal-jurnal melalui Google Cendekia/Google Scholar ataupun melalui bantuan aplikasi pencarian jurnal seperti *Harzing PoP*, Jurnal yang dipilih adalah jurnal keluaran 10 tahun terakhir agar sumbernya relevan dengan situasi yang ada saat ini. Setelah itu jurnal kemudian dianalisis, diringkas dan diklasifikasikan sehingga memunculkan konsep baru yang berhubungan dengan pembahasan. Peran MBKM terhadap kemandirian desa dikalsifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu membahas mengenai konsep desa mandiri meliputi pengertian desa mandiri, kerjasama desa, sasaran dan ciri desa mandiri serta potensi desa mandiri. Sedangkan implementasi program MBKM bahasannya meliputi landasan hukum penyelenggaraan MBKM, peran MBKM dalam mewujudkan desa mandiri, tujuan dan output program merdeka belajar kampus merdeka proyek di desa, serta manfaat program MBKM proyek di desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan desa yang memiliki ketersediaan serta akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum mengagumkan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa berdikari itu mencerminkan kemauan masyarakat desa yang bertenaga untuk maju, dihasilkannya produk/karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain menurut Wibowo dalam (Harjo, 2017) desa mandiri bertumpu pada trisakti desa yaitu; karsa, karya, sembada. Jika trisakti desa dapat dicapai maka desa itu disebut sebagai desa berdikari. Karsa, karya, sembada desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi desa dan antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa.

Menurut Daldjoeni dalam (Sitorus, 2020) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Bintarto dalam (Luthfia, Rizka, 2013) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. Sedangkan menurut Widjaja dalam (Barniat, 2019) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kerjasama Desa

Kerjasama antardesa artinya pilihan untuk mempercepat peningkatan ekonomi serta kemandirian melalui prosedur pengelolaan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan serta adil. Didalam pengembangan kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan menurut (Bhudianto, 2014) perlu disusun suatu konsep pengembangan kawasan perdesaan yang berkelanjutan. Dalam penanganan kawasan perdesaan berkelanjutan tersebut terdapat empat pilar atau atribut. Pertama, peningkatan kualitas SDM perdesaan (*community empowerment*). Kedua, peningkatan kualitas sarana prasarana perdesaan (*infrastructure improvement*). Ketiga, peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi (*economic livelihood improvement*). Serta keempat, peningkatan kualitas lingkungan dan warisan budaya lokal (*conservation and cultural preservation*). Selaras dengan tujuan kerja sama pada lingkup desa maka tujuan dari kerjasama desa wajib mampu menjawab serta mewujudkan tujuan pembangunan desa. Menurut Ariyanto (2019) tujuan kerjasama desa adalah sebagai berikut:

1. Mengelola, melindungi dan melestarikan aset desa beserta hasil kerjasama desa. Selama ini aset-aset desa yang berupa tanah, kas desa, sumber air, tambatan perahu, pasar desa, lembaga keuangan desa masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Melalui kerjasama desa kekayaan desa tersebut dapat dijadikan modal dan usaha ekonomi produktif dan memberikan manfaat kepada masyarakat maupun mendorong peningkatan ekonomi desa.
2. Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan usaha pelestarian dan usaha konservasi. Sebagai satuan wilayah, desa mempunyai kekayaan potensi sumber daya lingkungan dan belum dikelola secara optimal. Hutan desa, sumber mata air, pesisir, dan pantai yang membentang di antara desa akan sulit mencapai skala ekonomi apabila dikelola secara parsial. Pada beberapa kasus yang terjadi justru konflik pengelolaan maupun degradasi sumber daya. Dalam kerangka pengelolaan lingkungan desa, kerjasama desa merupakan salah satu instrumen yang dapat dijadikan alternatif untuk optimalisasi pengelolaan lingkungan bersama, baik dari aspek pemanfaatan maupun pelestariannya. Masyarakat mempunyai akses terhadap pengelolaan sumber daya yang dilandasi prinsip keterbukaan dan keadilan. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan sebagai cabang kerja sama desa diantaranya adalah pengembangan desa wisata, pengelolaan air minum, dan pengairan.
3. Meningkatkan pengelolaan potensi unggulan. Selama ini potensi komoditas unggulan di bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan desa masih diusahakan secara tradisional sehingga tidak mencapai skala ekonomi. Keterbatasan modal usaha, sarana produksi dan teknologi merupakan masalah yang dihadapi masyarakat desa. Selain itu ketika produksi melimpah persoalan yang muncul adalah rendahnya daya tawar petani ketika berhadapan dengan pedagang dan tengkulak. Persoalan klasik tersebut dapat diatasi melalui kerjasama desa sebagai upaya meningkatkan pengelolaan potensi unggulan untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan adalah melalui pengelompokan (klusterisasi) setiap jenis komoditas unggulan.
4. Keterkaitan antar wilayah. Melalui kerjasama desa setiap desa dapat secara bersama-sama merencanakan, membangun dan mengembangkan kebutuhan infrastruktur baik antardesa maupun infrastruktur yang

menghubungkan desa ke pusat pertumbuhan. Konektivitas tersebut akan menjadikan desa mempunyai daya tarik sehingga mendorong mengalirnya investasi. Beberapa infrastruktur yang dapat dibangun melalui kerjasama desa diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, transportasi, energi, dan telekomunikasi.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerjasama desa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip kerjasama dapat mewujudkan pelayanan yang baik. Tuntutan pelayanan di bidang investasi, pengelolaan sumber daya, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan menjadikan desa mempunyai daya tarik investasi dan menciptakan daya saing.
6. Membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru (*new economic growth*). Berkembangnya aktivitas usaha ekonomi, peningkatan pelayanan publik sebagai dampak pelaksanaan kerjasama desa, pada akhirnya akan mendorong terwujudnya desa-desa yang bekerja sama menjadi embrio atau pusat pertumbuhan baru. Sebagai pusat aktivitas ekonomi produktif, pusat jasa keuangan, dan perdagangan akan berdampak terhadap penciptaan perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
7. Menghilangkan ego daerah. Melalui kerja sama tersebut, kecenderungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh. Di masa mendatang, kerjasama antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan. Untuk itu harus ada upaya yang sistematis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk memperkenalkan, mendorong dan menginstitusionalisasikan kerjasama antara daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya.

Sasaran dan Ciri Desa Mandiri

Kemandirian desa menurut (Endah, 2018) merupakan isu yang sangat sentral untuk menjadikan pembangunan masyarakat menjadi lebih berdaya guna Sasaran desa mandiri sebagaimana dikatakan oleh (Bachrein, 2010) adalah membaiknya kinerja pembangunan di pedesaan, meningkatnya koordinasi antar-instansi terkait di semua level pemerintahan dalam pembangunan di pedesaan, meningkatnya keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan di pedesaan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga melalui pengembangan usaha produktif di pedesaan, meningkatnya pengelolaan pembangunan desa secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sedangkan secara umum ciri desa mandiri antara lain:

1. Kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya
2. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan (desa bisa merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pembangunan dan pengawas hasil pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya)
3. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, kaum difabel, penyandang masalah sosial, dan warga yang termarginalkan lainnya
4. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya.

Potensi Desa Mandiri

Desa mandiri tentunya memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, sehingga nantinya potensi tersebut bisa membawa penghasilan tersendiri bagi warga desa. Menurut Chaniago (2020) ada lima potensi desa yang bisa dikembangkan yaitu :

1. Sumber Air. Warga pedesaan seringkali menyepelekan sumber air. Padahal, sumber air memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Di kota, air termasuk dalam faktor produksi. Air itu mempengaruhi produksi, di desa itu tidak terasa padahal manfaat untuk produktivitas itu tinggi. Air, bisa digunakan untuk kegiatan

peternakan, hilirisasi pangan, dan pembangkit listrik. Namun, warga desa seringkali tak sadar bahwa air merupakan sumber produksi bagi banyak kegiatan usaha.

2. **Furnitur.** Warga desa juga tak sadar bahwa kayu bekas peralatan kerja bisa diolah menjadi furnitur yang layak jual. Saat ini banyak material kayu yang menganggur, bambu, kayu, dan pohon kelapa yang menganggur itu tidak dimanfaatkan, padahal itu bisa menjadi salah satu sumber ekonomis bagi masyarakat desa. Masyarakat pedesaan bisa menjual produk olahan itu ke kota. Saat ini banyak warga kota yang membutuhkan peralatan rumah tangga berbahan dasar kayu.
3. **Lahan.** Banyak lahan yang tidak digunakan dan tidak dioptimalkan di desa. Sementara, ada berbagai pilihan bagi warga desa memanfaatkan lahan tersebut agar lahan tersebut bisa menjadi produktif dan menghasilkan pemasukan bagi warga desa.
4. **Potensi Hilirisasi Tanaman dan Buah-Buahan.** Tanaman dan buah-buahan biasanya tumbuh subur di desa, hal itu bisa memberikan nilai tambah, penghasilan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
5. **Pariwisata.** Mayoritas masyarakat kelas menengah ke atas seringkali berkunjung ke desa untuk berlibur. Jika di pedesaan ditambahkan fasilitas-fasilitas kemudian sistem pelayanan maka hal tersebut akan menjadi potensi besar mendapatkan penghasilan dari sektor pariwisata.

Landasan Hukum MBKM

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Peran MBKM dalam Mewujudkan Desa Mandiri

Kegiatan membangun desa merupakan salah satu dari 8 kegiatan belajar di luar kampus dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dimana mahasiswa berkesempatan melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1. Kegiatan membangun desa ini memungkinkan mahasiswa memiliki pengalaman langsung di lapangan berkaitan dengan kemampuan membangun desa di bidang pendidikan maupun bidang umum, yang memiliki kompetensi merancang, menciptakan, dan menjalankan program-program membangun desa sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.

Pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terdiri dari pemerintah, masyarakat, lembaga/swasta, dan perguruan tinggi. Selama ini para pemangku kepentingan dalam pembangunan desa belum terintegrasi satu dengan lainnya untuk mewujudkan desa mandiri. Penting untuk diketahui sebelumnya siapa saja dan peran apa

saja yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait. Pertama, pemerintah memiliki kepentingan untuk memajukan wilayahnya dan memberikan akses informasi serta birokrasi guna memajukan wilayahnya. Kedua, masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan desa karena tanpa kesadaran masyarakat desa maka perencanaan pembangunan desa tidak dapat terlaksana dengan baik. Ketiga, perguruan tinggi yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan fungsi pengabdian dan penelitian pembangunan desa. Keempat, lembaga/konsultan perencanaan dapat memberikan arahan profesional terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Kepentingan dan peran tersebut dapat diintegrasikan melalui kebijakan kampus merdeka yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Harapan dengan adanya program kampus merdeka ini dapat mendorong dalam mewujudkan desa-desa mandiri di Indonesia.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam program membangun desa adalah partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan dalam konteks membangun desa adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi berbagai masalah dan potensi yang terdapat di desa. Mahasiswa bisa berperan serta dalam proses pemberdayaan tersebut, dengan cara ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan sistem pengelolaan desa baik melalui pemerintah desa maupun masyarakat. Pada akhirnya melalui program proyek di desa mahasiswa akan memiliki pengalaman berwujud pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditemukan dalam proses membangun desa. Proses ini sangat diperlukan agar mahasiswa dapat menemukan secara langsung implementasi dari berbagai materi perkuliahan yang mereka pelajari di dalam kelas sehingga pengetahuan yang dimiliki tidak hanya bersifat teoritis saja. Mahasiswa benar-benar belajar mempraktikkan pengetahuan, pengalaman serta mental dalam situasi di masyarakat karena pada akhirnya setelah mahasiswa lulus dari kampus, mereka akan terjun ke masyarakat.

Perguruan tinggi menurut (Baharuddin, 2021) merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti bencana alam, konflik sosial, dan permasalahan adat. Selain itu perguruan tinggi menurut Caritra (2020) juga dapat memanfaatkan kebijakan kampus merdeka ini untuk menjalin kemitraan dengan konsultan perencana atau pemangku kepentingan dan mulai membangun relasi dengan perguruan tinggi yang kemudian dapat menggandeng mahasiswa dan akademisi dalam proyek yang dikerjakannya. Mekanisme ini dapat menguntungkan berbagai pihak yang terlibat, konsultan perencana mendapat tenaga bantuan dari mahasiswa, perguruan tinggi mendapat kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu maupun memulai riset, dan mahasiswa mendapat arahan dan pengalaman. Pemerintah daerah juga sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan kampus merdeka proyek di desa. Kebijakan kampus merdeka ini bisa meningkatkan efisiensi perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan desa karena dalam prosesnya turut melibatkan para ahli, peneliti, dan akademisi. Agenda pembangunan desa akan lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan dalam terwujudnya desa-desa mandiri di Indonesia.

Tujuan dan Output Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Proyek Di Desa

Secara khusus menurut Jatmiko dan Januarti (2021) proyek di desa yang merupakan bagian dari program merdeka belajar kampus merdeka mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan prinsip partisipasi dalam pembangunan desa (*participatory development*).
2. Memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dengan bantuan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan ataupun pembangunan desa (*learning society*).
3. Mendayagunakan kegiatan membangun desa sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi (*empowerment tool*).

Sedangkan output yang diharapkan dari program proyek di desa adalah sebagai berikut :

1. Terdapat peran serta mahasiswa dari perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah desa dalam proses kajian potensi dan permasalahan di desa sehingga berguna bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

2. Terdapat peran serta mahasiswa bersama pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengevaluasi pembangunan desa.
3. Adanya upaya-upaya inisiasi mahasiswa dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas sosial masyarakat sebagai dasar dalam menggerakkan pemerintahan desa (*local administration*), usaha ekonomi lokal (*local business*), dan budaya bekerja sama dan tolong menolong secara sukarela (*local voluntary*).
4. Adanya identifikasi kader desa, potensi pengembangan kerja sama desa, dan Badan Usaha Milik Desa.

Manfaat Program MBKM Proyek Di Desa

MBKM tentunya membawa manfaat baik itu bagi kemandirian desa maupun bagi mahasiswa, bagi desa manfaat MBKM diantaranya adalah 1) Membantu mewujudkan kemandirian desa karena MBKM menawarkan program-program yang bisa diaplikasikan dengan mudah oleh warga desa, sehingga desa tersebut bisa lebih berdayaguna. Contoh program yang bisa ditawarkan diantaranya kursus wirausaha desa (KWD). 2) Meningkatkan sumber daya manusia warga desa, karena program MBKM melalui mahasiswa memberikan pengetahuan mengenai berbagai kecakapan hidup yang bisa dipakai warga desa untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga nantinya akan menjadi warga desa yang mandiri. 3) Membantu desa untuk bisa mandiri dari segi administrasi pengelolaan keuangan maupun tata kelola, dengan cara memberikan pengetahuan mengenai manajemen keuangan sederhana maupun administrasi tata kelola desa.

Disamping membawa manfaat bagi warga desa program MBKM proyek di desa juga membawa banyak manfaat bagi mahasiswa. Menurut (Susilawati, 2021) MBKM akan memberikan mahasiswa pengalaman belajar (*experience learning*) sebagai bekal menghadapi hidup dan kehidupan di masa depan. Sejalan dengan hal tersebut Jatmiko dan Januarti (2021) mengemukakan MBKM proyek di desa mempunyai beberapa manfaat seperti 1) Meningkatnya pengetahuan mahasiswa mengenai pembangunan desa sehingga diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi dalam percepatan peningkatan pembangunan desa. 2) Meningkatnya kualitas sumber daya mahasiswa pada khususnya dan warga desa pada umumnya. Hal ini sangat diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. SDM pembangunan desa sangat diperlukan. Mahasiswa merupakan salah satu sumber daya yang dapat diperhitungkan karena nantinya setelah lulus, mahasiswa ini bisa menyumbangkan ilmu yang didapatnya dari berbagai bidang keahlian untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan desa pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. 3) Meningkatkan pemahaman dosen, mahasiswa, masyarakat dan para mitra kerja tentang pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam SGDs dan *education for sustainable development* (ESD) melalui implementasi membangun desa. 4) Meningkatkan kualitas dan luasan jejaring kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan membangun desa. 5) Meningkatkan aktivitas penggalan, penulisan dan publikasi pengetahuan. 6) Berpengaruh pada dinamisasi kehidupan masyarakat desa melalui interaksi yang dibangun mahasiswa baik pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan desa selama pelaksanaan program membangun desa. 7) Mempromosikan program kegiatan membangun desa sebagai wahana penyelesaian suatu permasalahan berbasis kearifan dan potensi lokal serta kerjasama kemitraan kepada masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan yang lain. 8) Meningkatkan kualitas dan kesinambungan kegiatan membangun desa dan program kampus lainnya di tengah masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

Manfaat MBKM bagi proyek di desa tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Syawie, 2015) yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemandirian desa dibutuhkan strategi dan upaya yang serius, komprehensif, dan partisipatif untuk menegaskan kembali eksistensi desa sebagai daerah yang otonom dan mandiri. Menyadari persoalan dan beban yang cukup berat bagi desa, diperlukan strategi-strategi partisipatif dari masyarakat desa untuk membangun desanya, salah satunya bisa dengan menggunakan bantuan program MBKM. Sejalan dengan hal tersebut (Mariati, 2021) mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang

memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang menuju kepada penanaman karakter berakhlak mulia, dengan adanya program MBKM proyek didesa diharapkan mahasiswa akan mampu menjawab tantangan tersebut dengan baik.

KESIMPULAN

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk merespon adanya transformasi pembelajaran sebagai akibat adanya perubahan ilmu dan kompetensi yang saat ini berubah dengan sangat cepat seperti yang terjadi selama pandemi ini. Di era pandemi ini kebijakan yang dilakukan harus selalu siap menerima perubahan setiap saat. Dinamika dibutuhkan untuk bisa fleksibel dan kreatif dalam menghadapi perubahan. Perguruan tinggi salah satunya dapat mengimplementasikan kemerdekaan belajar bagi mahasiswa melalui program-program di desa. Pembangunan desa tidak dapat berjalan optimal karena beberapa hal antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia, belum terbentuk kelembagaan desa yang kompeten, kurangnya partisipasi masyarakat desa, dan ketiadaan sistem regulasi desa yang dapat mendorong kemandirian desa. Pembangunan desa yang tidak optimal semestinya segera ditangani dengan segera, mengingat desa menyimpan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kemandirian desa. Kebijakan kampus merdeka melalui program proyek didesa diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan tersebut selain itu adanya program kampus merdeka ini juga diharapkan dapat mendorong dalam mewujudkan desa-desa mandiri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). the Development of Rural Resilience With Empowering Concept : a. *Sosio Informa*, 1(2), 175–188.
- Ariyanto, Nur. (2019). *Modul KKN Desa Membangun Kerjasama Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan Pembangunan Desa Di Jawa Barat: Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Developing Village Approach in West Java : Rural Development Policy and Strategy. *IAARD E-Journal*, 8(2), 133–149. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4227/3567>
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa : Konsepsi teoritis dan lega; *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33. <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/13>
- Bhudianto, W. (2014). Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Kerjasama Antara Desa Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan). *Jurnal Transformasi*, 1(26), 23.
- Caritra. (2020). *Kebijakan Kampus Merdeka Kesempatan Emas Dalam Membangun Desa*. Tersedia: <https://www.caritra.org/2020/10/05/kebijakan-kampus-merdeka-kesempatan-emas-dalam-membangun-desa/>
- Chaniago, Andrinof A. (2020). *5 Potensi Desa Yang Bisa Dioptimalkan*. Tersedia: cnnindonesia.com/ekonomi/20200809221955-92-533852/5-potensi-desa-yang-bisa-dioptimalkan
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Moderat*, 4(4), 25–33. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Dwiningrum, S. I. A. "Strengthening resilience for learning transformation and anticipatory education in the era of society 5.0." *Educational Innovation in Society 5.0 Era: Challenges and Opportunities: Proceedings of the 4th International Conference on Current Issues in Education (ICCIE 2020), Yogyakarta, Indonesia, 3-4 October 2020*. Routledge, 2021.

- 6317 *Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa – Revita Yanuarsari, Iwan Asmadi, Hendi Suhendraya Muchtar, Rita Sulastini*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828>
- Harjo, B. (2017). Model Membangun Desa Mandiri. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 2(1), 27–35.
- Jatmiko, Datu dan Nur Endah Januarti. (2021). *Model Kegiatan Pembelajaran Membangun Desa*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kasful, Anwar, U. (2013). (Suatu Fungsi untuk Pendidikan yang Bermutu). *Jurnal Investasi*, 1–10.
- Luthfia, Rizka, A. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. In *Jurnal of Rural and Development: Vol. IV* (Issue 2, pp. 135–143).
- Mariati. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 749–761.
<https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/405>
- Rasyid, H. (2015). Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 565–581. <https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12345>
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi program merdeka belajar kampus merdeka di era digital dalam menciptakan karakter mahasiswa hukum yang berkarakter dan profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 425–434.
- Satiti, S. (2019). Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro: Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Untuk Menyongsong Bonus Demografi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1), 77.
<https://doi.org/10.14203/jki.v14i1.351>
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>
- Sitorus, R. (2020). Pengaturan Kerjasama Pemerintahan Desa dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa (Arrangement of Village Government Cooperation withthird Parties in Village Development). *Jurnal STINDO Profesional*, VI(4), 1–26.
- Supriyadi. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83.
<https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kaajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219.